



LAPORAN PENGADUAN

REKOMENDASI DAN TEMUAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL APIP TAHUN 2023

**PUSAT PENERANGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya Tahun 2023

**Rekomendasi dan Temuan Hasil Pengawasan Internal APIP
Tahun 2023**

1. Audit Ketaatan Lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan ketaatan pada 29 (dua puluh sembilan) Satuan Kerja dengan total temuan sebanyak 262 dan rekomendasi sebanyak 504. Adapun rincian jumlah temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Temuan dan Rekomendasi Audit Ketaatan Tahun 2023

NO.	SATUAN KERJA	TEMUAN	REKOMENDASI	NILAI TEMUAN (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	10	24	34.634.980,00
2	Inspektorat Jenderal	4	10	6.100.000,00
3	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	9	18	13.270.900,00
4	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	2	2	0
5	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	5	10	0
6	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	9	19	28.835.000,00
7	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	17	33	10.830.000,00
8	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	5	13	0
9	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	8	0
10	Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri	4	9	0
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	9	0
12	IPDN Kampus Jatinangor	20	49	2.420.625,00
13	PPSDM Regional Bukit Tinggi	8	13	0
14	PPSDM Regional Bandung	3	10	16.169.818,00
15	PPSDM Regional Yogyakarta	10	17	0
16	PPSDM Regional Makassar	10	20	14.000.000,00
17	Balai PK Satpol PP dan Damkar	7	16	5.060.630,80
18	IPDN Kampus Sulawesi Utara	10	18	0
19	IPDN Kampus Sulawesi Selatan	11	19	5.289.600,00
20	IPDN Kampus Sumatera Barat	13	30	12.637.478,00
21	IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat	13	22	5.850.031,17
22	IPDN Kampus Kalimantan Barat	15	29	0
23	IPDN Kampus Papua	12	22	91.183.879,00
24	IPDN Kampus Jakarta	8	14	5.346.552,00
25	Balai Besar Pemerintahan Desa Malang	11	15	0
26	Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta	7	11	0
27	Balai Pemerintahan Desa Lampung	12	17	0
28	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	10	19	9.170.850,00
29	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	7	8	0
TOTAL		262	504	260.800.343,97

Sumber: Aplikasi SIWASIAT, cut-off 19 September 2025

2. Tindak Lanjut Audit Ketaatan Lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2023

Untuk Pemeriksaan Ketaatan di lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2023, sampai dengan tanggal 19 September 2025 masih terdapat 61 rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dari total 504 rekomendasi atau 12,10%, dengan sisa setoran keuangan senilai Rp101.856.835,97 dari total setoran senilai Rp260.800.343,97 atau 30,06%. Berikut tabel rekapitulasi data tindak lanjut untuk pemeriksaan ketaatan Tahun 2023.

Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya Tahun 2023

Tabel 2
Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Audit Ketaatan Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	REKOM	S	BS	BD	TPTD	NILAI (Rp)	SETOR (Rp)	SISA (Rp)	PERSENTASE %
1	Sekretariat Jenderal	24	24	0	0	0	34.634.980,00	34.635.160,00	0,00	100,00%
2	Inspektorat Jenderal	10	10	0	0	0	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00%
3	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	18	18	0	0	0	13.270.900,00	13.270.900,00	0,00	100,00%
4	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	2	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00%
5	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	10	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00%
6	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	19	19	0	0	0	28.835.000,00	28.835.000,00	0,00	100,00%
7	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	33	28	5	0	0	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	84,85%
8	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	13	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00%
9	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	7	1	0	0	0,00	0,00	0,00	87,50%
10	Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri	9	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00%
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	5	2	2	0	0,00	0,00	0,00	55,56%
12	IPDN Kampus Jatinangor	49	47	1	1	0	2.420.625,00	2.420.625,00	0,00	95,92%
13	PPSDM Regional Bukit Tinggi	13	13	0	0	0			0,00	100,00%
14	PPSDM Regional Bandung	10	10	0	0	0	16.169.818,00	16.169.818,00	0,00	100,00%
15	PPSDM Regional Yogyakarta	17	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00%
16	PPSDM Regional Makassar	20	17	3	0	0	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	85,00%
17	Balai PK Satpol PP dan Damkar	16	16	0	0	0	5.060.630,80	5.060.631,00	0,00	100,00%
18	IPDN Kampus Sulawesi Utara	18	0	0	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	IPDN Kampus Sulawesi Selatan	19	19	0	0	0	5.289.600,00	5.289.600,00	0,00	100,00%
20	IPDN Kampus Sumatera Barat	30	25	4	1	0	12.637.478,00	1.964.340,00	10.673.138,00	83,33%
21	IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat	22	22	0	0	0	5.850.031,17	5.850.032,00	0,00	100,00%
22	IPDN Kampus Kalimantan Barat	29	20	0	9	0	0,00	0,00	0,00	68,97%
23	IPDN Kampus Papua	22	15	3	4	0	91.183.879,00	0	91.183.879,00	68,18%
24	IPDN Kampus Jakarta	14	14	0	0	0	5.346.552,00	5.346.552,00	0,00	100,00%
25	Balai Besar Pemerintahan Desa Malang	15	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00%

Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	REKOM	S	BS	BD	TPTD	NILAI (Rp)	SETOR (Rp)	SISA (Rp)	PERSENTASE %
26	Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta	11	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00%
27	Balai Pemerintahan Desa Lampung	17	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00%
28	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	19	14	3	2	0	9.170.850,00	9.170.850,00	0,00	73,68%
29	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	8	6	0	2	0	0,00	0,00	0,00	75,00%
TOTAL		504	443	22	39	0	260.800.343,97	158.943.508,00	101.856.835,97	87,90%

Sumber: Aplikasi SIWASIAT, cut-off 19 September 2025

Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya Tahun 2023

3. Audit Kinerja Lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2023

Audit Kinerja pada unit kerja eselon I Kemendagri dan BNPP dilakukan berbasis risiko. Perhitungan risiko memperhatikan hasil risk register (60%) dan faktor serta bobot risiko (40%) yang perhitungannya sudah dimuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahun 2023. Audit Kinerja juga dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan menurut program strategis dari masing-masing Unit Kerja. Berikut jumlah temuan dan rekomendasi audit kinerja pada Kemendagri dan BNPP.

Tabel 3
Jumlah Temuan dan Rekomendasi Audit Kinerja Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	TEMUAN	REKOM
1	Sekretariat Jenderal	-	-
2	Inspektorat Jenderal	3	3
3	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	2	4
4	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	3	4
5	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	1	5
6	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	2	6
7	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	1	5
8	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	3	12
9	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	4
10	Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri	4	4
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	2
12	IPDN Kampus Jatinangor	5	9
13	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	6	16
14	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	10	18
TOTAL		43	92

Sumber: Aplikasi SIWASIAT, cut-off 19 September 2025

4. Tindak Lanjut Audit Kinerja Lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2023

Untuk Pemeriksaan Kinerja di lingkup Kemendagri dan BNPP Tahun 2023, sampai dengan tanggal 19 September 2025 masih terdapat 81 rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dari total 92 rekomendasi atau 88,04%. Berikut tabel rekapitulasi data tindak lanjut untuk pemeriksaan kinerja tahun 2023.

Tabel 4
Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	REKOM	S	BS	BD	TPTD	PERSENTASE%
1	Sekretariat Jenderal	-	-	-	-	-	-
2	Inspektorat Jenderal	3	3	0	0	0	100,00%
3	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	4	3	0	1	0	75,00%
4	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	4	4	0	0	0	100,00%
5	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	5	5	0	0	0	100,00%
6	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	6	2	4	0	0	33,33%

Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	REKOM	S	BS	BD	TPTD	PERSENTASE%
7	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	5	5	0	0	0	100,00%
8	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	12	1	11	0	0	8,33%
9	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	2	2	0	0	50,00%
10	Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri	4	4	0	0	0	100,00%
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	1	1	0	0	50,00%
12	IPDN Kampus Jatinangor	9	6	2	1	0	66,67%
13	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	16	3	11	2	0	18,75%
24	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	18	9	2	7	0	50,00%
TOTAL		92	48	33	11	0	52,17%

Sumber: Aplikasi SIWASIAT, cut-off 19 September 2025

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Jenderal Kemendagri dalam hal ini melaksanakan tindak lanjut setiap pengaduan masyarakat yang merupakan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah pusat dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contohnya yaitu berupa penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin pegawai.

Dari hasil pengadministrasian surat pengaduan masyarakat yang diterima Inspektorat Jenderal Kemendagri sejak tahun 2023 s.d. 2054. Hasil inventarisasi pengelolaan pengaduan selama 2023 s.d 2025 (per tanggal 10 September 2025) sebanyak 1.701 (seribu tujuh ratus satu) pengaduan. Sebanyak 1.701 pengaduan dimaksud, telah diverifikasi untuk dilakukan penanganan dengan penjelasan sebagai berikut:

Jumlah Pengaduan Tahun 2023 : 564 pengaduan

- a. Jenis Pengaduan terdiri dari:
 - 1) Pengaduan Berkadar Pengawasan: 564
 - a) Penyalahgunaan Wewenang : 115
 - b) Pelanggaran Disiplin Pegawai : 76
 - c) Pelanggaran Administrasi : 319
 - d) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : 54
- b. Laporan Penindakan terdiri dari:
 - 1) Selesai :
 - a) LHP/ LHK : 11
 - b) Pelimpahan : 47
 - c) arsip : 506